

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020



KANTOR KECAMATAN PURI
KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Puri , 29 Januari 2021

CAMAT PURI

NALURITA P., SSTP., M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
.....	1
A. Latar Belakang	2
.....	4
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB II	8
C. Struktur Organisasi	8
.....	8
BAB III D. Sistematika Penyajian	11
.....	11
Perencanaan Kinerja	28
BAB IV	21
A. Rencana Kinerja	21
Tahunan.....	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
.....	
A. Capaian Kinerja	
.....	
B. Analisis Capaian	
Kinerja	
C. Realisasi	
Anggaran	
.....	
Penutup	
.....	
A. Kesimpulan	
.....	
.....	
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Puri 2016 - 2021	
2. Matriks Renja Kecamatan Puri Tahun 2019	
3. Matriks Renja Kecamatan Puri Tahun 2020	
4. IKU Kecamatan Puri	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 n	
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	
8. Struktur Organisasi	
9. Laporan Kinerja JFU	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Puri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP

Kantor Kecamatan Puri juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Puri berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Puri terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Puri sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kec. Trowulan



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Puri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Puri berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

- a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Puri.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2020, Kecamatan Puri masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai. Awal tahun 2020 baru saja menempati gedung Kantor Kecamatan Puri baru , sehingga untuk sementara proses kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih dilaksanakan dengan kondisi seadanya.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan

Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Puri termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Puri ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Perilaku hidup sehat terutama kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana bermain / olah raga untuk masyarakat terus kurang.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada perangkat daerah kecamatan dan Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Puri selama

tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Puri Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Puri pada tahun 2020 sebagai berikut :

RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2020
KECAMATAN PURI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan .	79 %
2	Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Prosentase kepuasan rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian , ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial.	80 %

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN PURI**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Prosentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79 %
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintaham, Pemb angunan perekonomian, ketent raman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social .	80 %

N O	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pelayanan	Rp. 291.000.000,00	APBD

	Administrasi Perkantoran	Rp. 331.534.227,00	PAPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46.000.000,00 Rp. 57.750.000,00	APBD PAPBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 12.000.000,00 Rp. 6.200.000,00	APBD PAPBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Kecamatan	Rp. 313.000.000,00 Rp. 268.045.000,00	APBD PAPBD
JUMLAH ANGGARAN APBD		Rp 662.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN PAPBD		Rp 663.529.227,00	PAPBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Puri Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Prosentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan.	79 %	96,77%	122,49 %
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentr aman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	80 %	90,60%	113,33 %

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Standar Pelayanan Minimal, dengan indikator kinerja Cakupan Pelayanan Umum dan Perijinan (PATEN) target 79 %, realisasi 96.77 % dengan capaian 122,49 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja

Sasaran Strategis 2

Sasaran kedua terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hasil koordinasi yang ditindaklanjuti . Target dari kegiatan ini sebesar 80 % . Realisasi yang dicapai per tanggal 30 Desember 2020 adalah 90,60 %, sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 113,33 %.

Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Program Koordinasi Penyelenggaraan pembangunan .
- Program Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat
- Program Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja PD Kecamatan Puri pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	79 %	70 %	71.81 %	96,77%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta	Persentase rekomendasi hasil koordinasi	80 %	- %	- %	90,60 %

Masyarakat dalam Pembangunan	yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan,Pembangunan perekonomian,ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.				
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISAS I	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	79%	96,77 %	17,77 %
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan,Pembangunan perekonomian,ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	80 %	90,60 %	10.6 %

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	77.32%	-	-
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	90.60%	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	395.484.227	60
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang :	268.045.000	40

		Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketertarikan dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal 1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan kualitas pelayanan di Kec.	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	79	76,48	96,81			
					331.534.227	319.218.332	96,29
					57.750.000	57.650.000	99,83
					6.200.000	6.000.000	96,77
				19.250.000	18.840.000	97,87	
Sasaran 2 Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta	Persentase rekomendasi	80%	90,60 %	113,25 %			

Masyarakat dalam Pembangunan	dasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perencanaan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.						
1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan des					12.000.000	12.000.000	100
2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kec.					8.950.000	7.750.000	86,59
3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat					186.245.000	163.169.000	87,61
4. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat					41.600.000	41.100.000	98,80

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	%	%	TINGKAT EFISIENSI
			CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	100%	97,87%	2,13
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perencanaan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	100 %	90,60 %	9,40

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8
PEHITUNGAN TARGET DAN REALISASI CAKUPAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2020

NO.	URAIAN	TARGET	REALI- SASI (%)	%
1	2	3	4	5
	PELAYANAN BIDANG PERIJINAN	17	17	100
	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 200 m2, tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha	17	17	100
B.	PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN	100	100	100
	1. Penetapan gaji berkala staf Kecamatan	100	100	100
	2. Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan	100	100	100
	3. Pelantikan Pejabat Kepala Desa	100	100	100
	4. Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu	100	100	100
	5. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	100	100	100
	6. Pemberian Rekomendasi atas permohonan izin keramaian	100	100	100
	7. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten	100	100	100
	TARGET	75	75	100

Sumber : data Kec. Puri

g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja .

Tabel 3.9
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
----	---------	-----------------	-------------------------------	---

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	331.534.227	319.218.332	96,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.750.000	57.650.000	99,83
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.200.000	6.000.000	96,77
4	Program peningkatan kualitas pelayanan kinerja kecamatan	268.045.000	242.859.000	90,60

C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Puri Tahun 2020 sebesar Rp.663.529.227,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.625.727.332,00 atau 94,30 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	TA. 2020		% Capaian Program	
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	50.400.000	41.603.824	82,5
1.			2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1.785.636	1.350.000	75,6
2.			3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.314.631	22.292.760	99,9
3.			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	8.500.000	100
4.			5	Penyediaan komponen instalasi listrik	3.000.000	3.000.000	100
			6	Penyediaan			

				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.000.000	109.512.000	98,6
5.			7	Penyediaan makanan dan minuman	88.000.000	85.220.000	96,8
6.			8	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	23.200.000	23.150.000	99,7
7.			9	Penyediaan jasa tenaga kerja	26.808.960	26.808.960	100
8.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	34.000.000	34.000.000	100
	11		Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ops	28.000.000	28.000.000	100	
9.	12		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100	
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	6.200.000	6.000.000	96,7
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	16	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	186.245.000	163.169.000	87,6
		Program penyelenggaraan pemerintahan	15	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / kelurahan	12.000.000	12.000.000	100

		n desa / kelurahan					
		Program Penyelenggar aan Pembanguna n di kecamatan		Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan	8.950.000	7.750.000	86,6
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	41.600.000	41.1300.000	98,8

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2020, 1 indikator kinerja yang mencapai 122,49 % capaian kinerja yaitu Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN) dan 1 indiktor mecapai 113,33% yaitu Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun-tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Puri Tahun 2020 sebesar Rp.663.529.227,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.625.727.332,00 atau 94,30 %

CAMAT PURI

NALURITA P., SSTP. M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

